

Hamas akan Masuk PLO

Dyah Ratna Meta Novia

Rekonsiliasi Tepi Barat dan Jalur Gaza semakin menjanjikan.

KAIRO — Pemimpin Hamas, Khaled Meshaal, mengatakan, Hamas akan bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dengan bergabungnya Hamas, akan terjadi reformasi dalam tubuh PLO. "Kami akan membicarakan penyatuan Palestina lebih lanjut," katanya, di Kairo, Kamis (22/12). Presiden Palestina Mahmud

Abbas dan Meshaal mendiskusikan reformasi PLO sehingga Hamas, Jihad Islam, dan 13 faksi lainnya di Palestina bisa bergabung dengan PLO. "Bergabungnya berbagai gerakan Palestina dengan PLO merupakan hal yang baru," kata Meshaal. Menurut Meshaal, diskusinya dengan Abbas berjalan dengan lancar. Situasi yang ada juga sangat mendukung dan kondusif. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Abbas tersebut juga dihadiri Kepala Intelijen Mesir, Murad Muwafi, dan anggota parlemen Palestina dari kelompok independen, Mustafa Bar-

ghouti. Barghouti mengatakan, pertemuan yang melibatkan dia dan pembisnis Munib al-Masri bersama dengan wakil-wakil Hamas dan Jihad Islam merupakan peristiwa yang bersejarah. "Ini merupakan pertama kalinya dilakukan pertemuan penyatuan visi para pemimpin politik dengan kelompok intelektual," katanya seperti dimuat AFP. Sementara itu, Kepala Delegasi Fatah, Azzam al-Ahmed, mengatakan bahwa pertemuan kali ini merupakan implementasi perjanjian rekonsiliasi Mei lalu. "Ini merupakan aplikasi konkret kerja sama antarsemua kekuatan politik," katanya. Tujuan pertemuan di Kairo kali ini, terang Ahmed, fokus utamanya merestrukturisasi kepemimpinan PLO dan badan legislatifnya, yaitu Dewan Nasional Palestina (PNC). "PNC sendiri akan mendemonstrasikan bahwa PLO merupakan satu-satunya wakil rakyat Palestina yang memiliki legitimasi," terangnya. Hamas menyatakan, akan membentuk komisi pemilu yang anggotanya adalah seluruh faksi Palestina. Sedangkan, PLO akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Komisi pemilu (KPU) sendiri akan dipimpin oleh Ketua PNC, Selim Zaanoun. Undang-undang terkait pemilu akan diberikan kepada setiap partisipan sehingga mereka bisa mempelajarinya dan memberikan respons pada 15 Januari mendatang. Dengan demikian, berbagai respons bisa didiskusikan dalam pertemuan pertama KPU. Kamis lalu, Abbas juga menandatangani pembentukan sembilan anggota panel terpisah untuk memetakan jalan bagi pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pembentukan panel tersebut juga dibuat untuk menyediakan forum bagi reformasi PLO.



PEMAKAMAN HAVEL: Warga mengheningkan cipta saat upacara pemakaman mendiang presiden Ceska, Vaclav Havel, di Kastil Praha, Ceska, Jumat (23/12). Penyair, politikus, penulis esai, dan pelarian ini adalah pahlawan Revolusi Beludru 1989. Pemakamannya dihadiri berbagai tokoh dunia seperti Perdana Menteri Inggris David Cameron, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, dan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy.

AS Dikecam Terkait Permukiman

Dyah Ratna Meta Novia

Sebanyak 14 anggota Dewan Keamanan (DK) PBB mengkritik Amerika Serikat (AS) karena memblokir kecaman atas pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina. Kecaman yang dilontarkan oleh negara-negara Eropa para sekutu Israel terhadap Israel tersebut benar-benar tak terduga dan belum pernah terjadi sebelumnya. Menanggapi hal itu, Departemen Luar Negeri Israel menyebut Eropa ikut campur dalam urusan dalam negeri Israel.

Selain itu, kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina juga semakin meningkat. Hal ini mendorong anggota DK PBB meminta agar perundingan damai Palestina-Israel segera dipercepat. Delegasi PLO, pada Kamis (22/12), dalam pernyataannya mengingatkan AS bahwa Palestina mendapatkan dukungan dari komunitas internasional untuk menentukan nasibnya sendiri. Komunitas internasional juga menganggap kebijakan pembangunan permukiman Israel itu ilegal.

Jika AS tidak menentang langkah Israel tersebut, kata PLO, AS akan semakin terisolasi dari arena internasional. Menanggapi hal itu, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland, mengatakan, pihaknya memang tidak mau mendukung pengecaman terhadap Israel. Namun, Washington juga tidak mengakui legitimasi pembangunan permukiman Israel. "Kami juga tidak berpikir bahwa kecaman terhadap Israel akan membuat Palestina dan Israel mau kembali ke meja negosiasi," katanya seperti dimuat Haaretz. ■ ed: yeyen rostyani

Turki Tarik Dubes karena RUU Genosida Prancis

Ditto Pappilanda

PARIS — Menyangkal terjadinya genosida akan dianggap ilegal oleh Prancis, Turki pun langsung menarik duta besarnya di Prancis. Pasalnya, Turki selama ini menyangkal pembunuhan massal terhadap etnis Armenia pada 1915 selama Kesultanan Turki Usmaniyah. Tindakan Turki ini terkait upaya parlemen Prancis meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang melarang penyangkalan genosida. RUU ini sudah mendapat dukungan mayoritas di Majelis Nasional Prancis—majelis rendah parlemen. Rencananya, RUU ini akan diperdebatkan di Senat 2012. Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan melihat, RUU yang diajukan oleh anggota

partai berkuasa Presiden Prancis Nicolas Sarkozy sebagai "politik yang didasarkan pada rasisme, diskriminasi, xenofobia."

Usulan partai Sarkozy dilihat Erdogan telah mengorbankan hubungan baik "demi perhitungan politik". Hal ini juga menunjukkan bahwa RUU itu upaya Sarkozy merebut suara dari etnis Armenia di Prancis dalam Pemilu 2012.

Erdogan mengabarkan bahwa pemerintahannya telah membatalkan semua pertemuan ekonomi, politik, dan militer dengan mitra NATO-nya itu. Mereka juga akan membatalkan izin bagi pesawat militer Prancis untuk mendarat di tanah Turki, termasuk kapal perang mereka di dermaga Turki. Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe berbicara kepada

wartawan setelah pemungutan suara, mendesak Turki untuk tidak bereaksi berlebihan. Ia menyerukan Turki untuk mengedepankan "akal sehat dan tenang". Juppe mengatakan bahwa langkah Turki untuk ikut menarik duta besarnya dari Prancis adalah keputusan yang disesalkannya.

"Yang saya harap sekarang adalah Turki tidak bereaksi berlebihan tentang keputusan Majelis Nasional Prancis. Ada banyak hal yang bisa kita dikerjakan bersama," kata Juppe.

Menurut sejarawan dan anggota parlemen Prancis, sekitar 1,5 juta etnis Armenia dibunuh. Mereka dibunuh di tempat yang sekarang menjadi Turki timur selama Perang Dunia I dalam kebijakan genosida yang disengaja dilakukan atas perintah pemerintahan Usmaniyah.

Pemerintah dan mayoritas rakyat Turki menilai, tuduhan genosida merupakan penghinaan bagi bangsa mereka. Otoritas Turki berpendapat bahwa jumlah korban jiwa di kedua belah pihak sama besarnya selama pertempuran di daerah tersebut.

"Saya tidak mengerti mengapa Prancis ingin menyensor kebebasan saya berekspresi," kata Hamza Yildiz, presiden asosiasi Montargis yang mewakili 700 keluarga Turki di Prancis, di luar Majelis Nasional.

Sebelumnya, sekitar 3.000 warga Prancis asal Turki melakukan aksi protes damai di luar parlemen menjelang pemungutan suara. Ini adalah aksi pertama kalinya dalam 32 tahun, sejak seorang diplomat Turki dibunuh oleh militan Armenia di pusat kota Paris. ■ reuters ed: yeyen rostyani

Partai Suu Kyi Daftar Pemilu

Ditto Pappilanda

NAYPYITAW — Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi mendaftarkan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Jumat (23/12) untuk mengikuti pemilihan umum (pemilu). Langkah ini menandakan kembalinya pemenang Nobel Perdamaian ini ke arena politik nasional Myanmar.

Suu Kyi (65 tahun) bulan lalu memutuskan untuk secara resmi terjun ke kancah politik di negara yang didominasi militer ini. Keputusannya dimungkinkan setelah reformasi tahun ini. Suu Kyi serta NLD pimpinan Tin Oo dan anggota partai lain mendaftarkan partai mereka di Komite Pemilihan Umum (KPU) di Ibu Kota Myanmar, Naypyitaw.

Partai Suu Kyi sempat memboikot pemilu tahun lalu karena aturan ketat yang, antara lain, melarang Suu Kyi menjadi kandidat. Pemerintahan junta militer akibatnya mendiskualifikasi NLD dari pemilu karena melakukan aksi boikot. Tetapi, pemerintah yang baru kini telah mencabut banyak aturan ketat semacam itu pada pemilihan mendatang.

Juru bicara NLD, Nyan Win, mengatakan, partai akan membuka kesempatan untuk semua kursi kosong. Suu Kyi, katanya, akan segera mengumumkan di wilayah pemilihan mana dia akan menjadi konstituen.

Hingga kini waktu pemilihan belum ditetapkan pemerintah. Namun, minggu lalu Ketua KPU, Tin Aye mengatakan, pemerintah akan mengumumkan tiga bulan sebelum pemilihan untuk memberikan waktu kampanye kepada para calon anggota legislatif.

Legitimasi

Membiarkan partai Suu Kyi kembali ke panggung politik kemungkinan akan memberikan pemerintah legitimasi yang lebih besar di dalam dan luar negeri. Suu Kyi telah mendulang pujian dari pengamat internasional dan kritikus termasuk Amerika Serikat

AUNG SAN SUU KYI

PENAHANAN SUU KYI

- Jul '89 - Menjadi tahanan rumah di Yangon
- Jul '95 - Bebas
- Sep '00 - Tahanan rumah
- Mei '02 - Bebas
- Mei '03 - Ditahan* kemudian jadi tahanan rumah
- Mei '07 - Masa tahanan berlanjut
- Mei '08 - Diperpanjang
- Mei '09 - Diperpanjang
- 13 Nov '10 - Bebas

Desain baru bendera Myanmar tahun 2010

*Suu Kyi ditahan di tahanan rahasia selama tiga bulan setelah terjadinya peristiwa "Depayin Massacre" pada 30 Mei 2003, sekitar 100 anggota NLD tewas.

Sumber: Reuters, CIA Factbook

RIWAYAT HIDUP

1945 - Lahir di Yangon dari pasangan Daw Khin Kyi dan Jenderal Aung San

1947 - Jenderal Aung San terbunuh di Yangon

1972 - Suu Kyi menikah dengan akademisi Inggris Michael Aris. Suu Kyi bertemu dengan dia saat belajar di Oxford University

1988 - Kembali ke Yangon untuk merawat ibunya, yang kemudian ibunya tersebut meninggal pada tahun itu

Agst - Jutaan orang berunjuk rasa menentang junta militer. Ratusan orang tewas akibat peluru militer

Sep - NLD terbentuk dan Suu Kyi menjabat sebagai sekjen

1989 - Jadi tahanan rumah karena dianggap membahayakan negara. Peleungi NLD lainnya juga ditahan

1990 - Dilarang ikut pemilu. Partai yang dipimpinnya meraih 392 dari 485 kursi di parlemen. Militer menolak serahkan kekuasaan

1991 - Meraih Nobel Perdamaian

Des - Suu Kyi keluar NLD karena tekanan junta



Aung San Suu Kyi, 66

1999 - Aris wafat. Junta mengizinkan Suu Kyi ke Inggris menghadiri pemakaman suaminya tapi dia menolak

2003 - Ditahan setelah para pendukungnya bertolak dengan pendukung junta militer

2009 - Divonis 18 bulan tahanan rumah karena mengizinkan penyusup tinggal di rumahnya

2010, Nov 13 - Dibebaskan

2011, Jul 4 - Bepergian ke luar Yangon untuk pertama kalinya setelah dibebaskan dari tahanan rumah

Agst - Bertemu Presiden Myanmar Thein Sein

Nov 21 - Menyatakan akan ikut pemilu agar masuk parlemen

Des 2 - Bertemu Menlu AS Hillary Clinton

(AS), karena berjuang memperkenalkan reformasi di negara tersebut.

Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS Hillary Rodham Clinton bahkan melakukan kunjungan bersejarah ke Myanmar. Langkah ini dipandang membuka pintu bagi Myanmar ke pentas politik internasional. Dalam kunjungan ini ia mengatakan ingin memastikan bahwa pemilu parlemen Myanmar berlangsung "bebas, adil, dan kredibel di mata rakyat".

Pemilu pada November 2010 lalu adalah yang pertama kalinya sejak NLD memenangkan pemilu pada 1990. Namun, dalam Pemilu 1990 tersebut, junta militer menolak kemenangan NLD dan menghalangi mereka duduk di par-

lemen.

Rezim militer menjebloskan Suu Kyi dalam tahanan rumah selama periode yang berbeda-beda selama 15 tahun. Dia baru dibebaskan setelah pemilu tahun lalu dan kini bebas untuk bepergian dan bertemu banyak orang. Namun, Pemerintah Myanmar masih menahan ratusan tahanan politik lainnya dan Suu Kyi mengatakan, NLD akan terus bekerja untuk pembebasan mereka.

Lulusan Universitas Oxford di bidang filsafat, politik, dan ekonomi ini adalah putri dari pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San. Sang jenderal tewas dibunuh, enam bulan sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1947. ■ ap/reuters ed: yeyen rostyani

KNKT

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Mengucapkan

Selamat Natal Dan Tahun Baru 2012

"Jangan abaikan keselamatan anda Merayakan Tahun Baru di tengah keluarga Merupakan kebahagiaan yang tidak terhitung. Hati hati setiap saat, Jangan berlomba cepat, Tidak mengapa datang terlambat, Asal kumpul keluarga dengan selamat"

Hindarkan berita duka, Rayakan Tahun Baru tanpa celaka

website : www.dephub.go.id/knkt, e-mail : knkt@dephub.go.id, Telp/Fax. (021) 3517606